



KPU
KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2019



**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

KPU Kabupaten Pacitan
Jalan Veteran No. 66 Pacitan
Kode Pos : 63512
Telp./Fax. (0357) 881122

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Pacitan Tahun 2019 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LK Sekretariat KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan Kinerja, pengukuran Kinerja, pelaporan Kinerja, evaluasi internal dan capaian Kinerja.

Selain itu, Sekretariat KPU juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian Kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU, serta menjadikan Sekretariat KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan Kinerja Setjen KPU diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Sekretariat KPU memiliki komitmen dan terns berupaya agar pelaksanaan Kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja Sekretariat KPU pada tahun 2019 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LK Setjen KPU Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga Kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU lebih baik lagi di masa mendatang dalam mendukung visi KPU untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

| Pacitan, Januari 2020
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan

Bambang Sutejo

DAFTAR ISI

Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Bab I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
C. Struktur Kelembagaan KPU
D. Struktur Organisasi
E. Sistematika
Bab II. Perencanaan Kinerja
A. Sasaran RPJMN 2015-2019
B. Rencana Strategis 2015-2019
C. Revisi Renstra
D. Rencana Kinerja Tahunan
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Bab III. Akuntabilitas Kinerja
A. Pengukuran Capaian Kinerja
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
C. Akuntabilitas Keuangan
Bab IV. Penutup
Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Lampiran 2: Pengukuran Kinerja Tahun 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat KPU merupakan organisasi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dengan satuan kerja yang sangat besar. Terdapat 4 sub bagian yang menjadi tanggung jawab Sekretariat KPU untuk mengelolanya dalam rangka mendukung kinerja KPU.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai target kinerja tahun 2018, dihadapkan dalam situasi yang tidak mudah dalam artian tahapan Pemilu yang berhimpitan. Selesai melaksanakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, KPU langsung menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil juga dapat ditegakkan. Selain itu, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilakukan Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran, dan capaian kinerja. Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2019 menyajikan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU.
 - a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU;
 - b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu;
 - c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data;
 - d. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
 - e. Pemeriksaan di lingkungan sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU. Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana.

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitandengan Penyelenggaraan Pemilu;

b. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.

Selain capaian kinerja tersebut, KPU juga melakukan modernisasi organisasi penyelenggaraan Pemilihan. Berbagai sistem informasi digunakan oleh KPU. Sistem informasi sebagai bagian modernisasi penyelenggaraan pemilihan yang dibuat KPU diantaranya adalah Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Tahapan (SITAP) dan Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG). Sistem informasi tersebut, satu sisi untuk memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan Pemilihan. Pada saat bersamaan, sistem tersebut memudahkan akses public atas proses Pemilihan. Pada ujungnya adalah meningkatnya kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemilihan.

Berbagai capaian kinerja tersebut, KPU mendapat pengakuan publik yang tidak sedikit. Setidaknya terdapat 5 (Lima) penghargaan yaitu:

1. Peringkat 1 Nasional Kategori Penyelenggara Pemilu Berintegritas.
2. Terbaik ke 3 dalam pengelolaan Website
3. Terbaik ke-2 Pejabat Pembuat Komitmen – Haning Wahyu P
4. Terbaik ke-2 Bendahara terbaik – Siti Azizah
5. Terbaik ke-2 Pengelola Keuangan Terbaik se-Jawa Timur

Kedepan, Sekretariat KPU berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilihan terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan yang belum optimalakan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih, regulasi, logistik, integritas penyelenggara Pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilihan semakin terpercaya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamantkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat KPU. Sekretariat KPU sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK).

LK Sekretariat KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LK ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU selama Tahun Anggaran 2019, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Sekretariat Tahun 2019 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum, Sekretaris KPU bertugas :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
5. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban
7. KPU; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

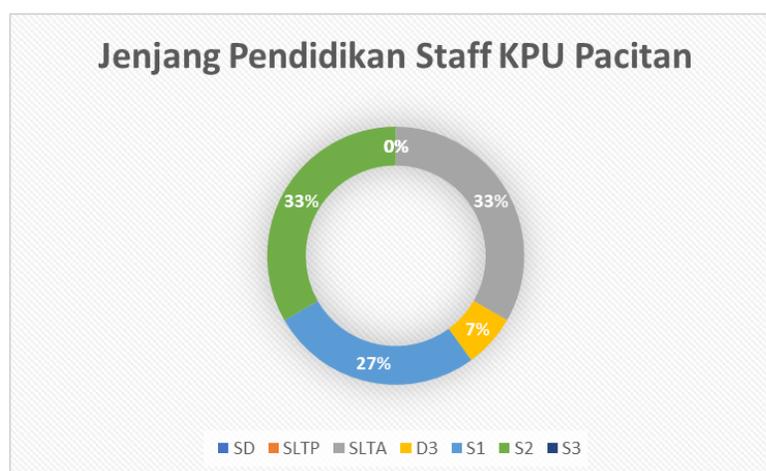
Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Sekretariat KPU terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
2. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
3. Ssub Bagian Hukum;
4. Sub Bagian Umum.

C. Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

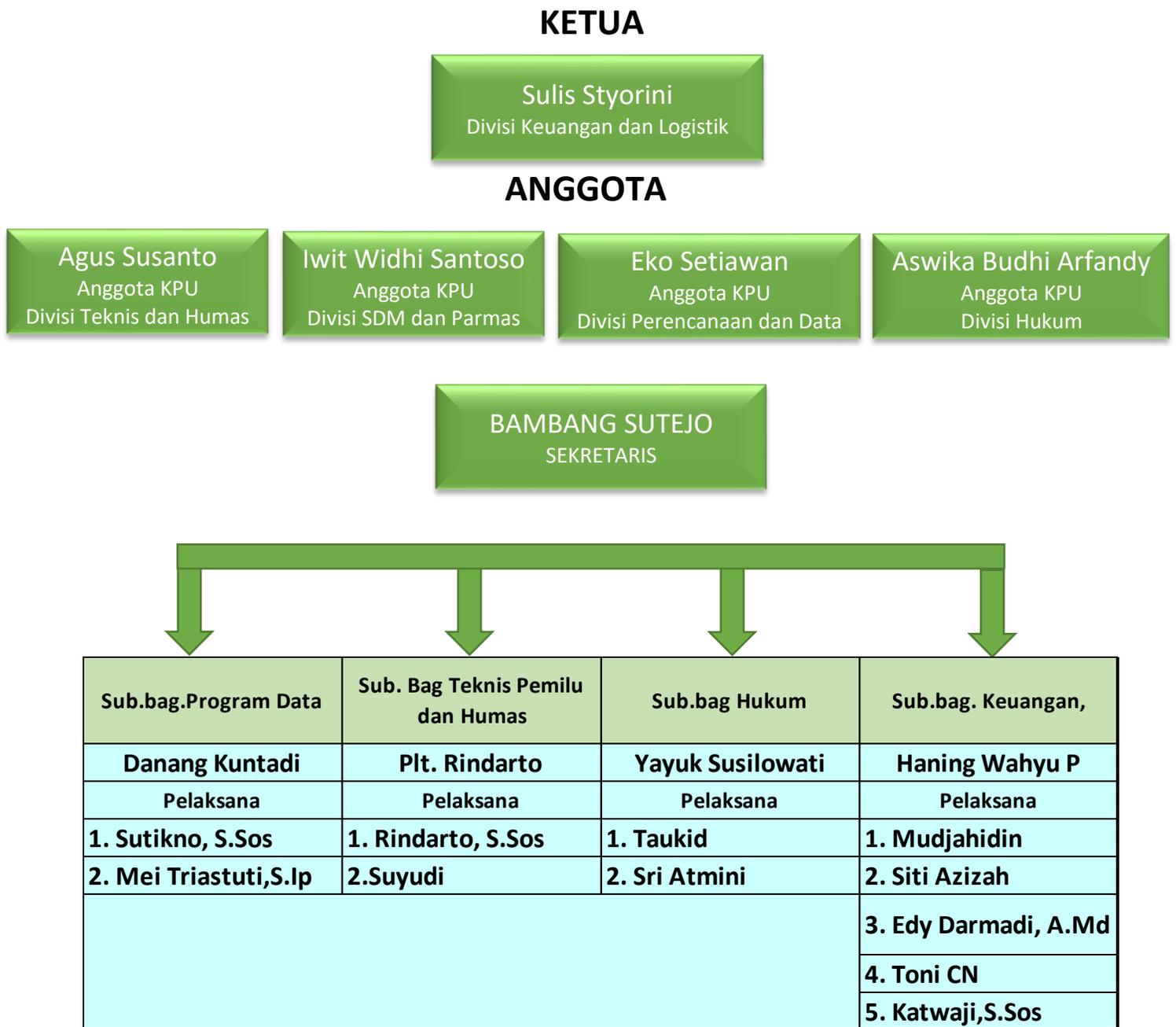
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Pacitan didukung oleh 15 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU dapat diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) golongan, antara lain: SD, SMP, SMA, S1, S2 dan S3. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.



Dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan D3 sebanyak 1 Orang Sarjana S1 yaitu 4 orang dan S2 sebanyak 5 orang selebihnya SLTA sebanyak 5 Orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada Grafik berikut:



D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indicator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Setjen KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Setjen KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaantugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)2015-2019.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2015-2019, Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya pemilu yang aman,adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2019 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak-hak politik sebesar 68 pada tahun 2019;
3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%;
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;
5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
2. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;

3. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
4. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
5. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
6. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong prses demokratisasi;
7. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
8. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi.
9. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif , dan fasilitasi dialog.

Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:

1. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
2. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
3. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian,dan sistem presidensial.

Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi

1. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
2. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
3. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
4. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
5. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
6. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.

Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:

1. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
2. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
3. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;

4. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
5. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
6. Penguatan *media centre*, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
7. Kampanye publik terkait reformasi mental;
8. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
9. Penguatan *Government Public Relation (GPR)* untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;

Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:

1. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
2. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
3. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi:

1. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
3. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi KPU dalam setiap lima tahun adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden

maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

B. Rencana Strategis 2015-2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015–2019 dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 90/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015–2019. Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu–isu strategis.

1. Visi dan Misi

KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

“menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL “.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat ;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketetapanegaraan;
6. Meningkatkan Integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

a. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi , kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

b. Sasaran

Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
4. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik

pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran- sasaran strategis Sekretariat KPU yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Data Pemilih yang akurat dan terkini, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi.
2. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM.
3. Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik
4. Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang- undangan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU
 - b. Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP
5. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU
6. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU
7. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU

C. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2015-2019, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kab. Pacitan			
1	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan;	2 Laporan
2	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid;	90%
3	Terselesaikannya laporan permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	78%
4	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan sesuai ketentuan	87%
Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu			
1	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase satker yang menyelenggarakan pemilu/ pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam logistik	100%
2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/ pemilihan	Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/ pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
3	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	90%
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data			
1	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan renja K/L dan RKA KL	77.50%
		Persentase kemajuan penyusunan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU	100% penerapan
2	Terwujudnya koordinasi antar lembaga	persentase fasilitasi kerjasama KPU Kab. Pacitan dengan lembaga lain	77.50%
3	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	78%
		Persentase tercapainya target kinerja sesuai dengan penetapan kinerja	65,00%

	Tersedianya data dan informasi kepemiluan	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan	100%
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	85%
2	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan BMN KPU	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kab Pacitan ke dalam aplikasi SIMAK	100%
3	Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Persentase laporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	100%
4	Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindaklanjut	100%
	Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU	100%
6	Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	70%
7	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase pengelolaan arsip sesuai aturan kearsipan	70%
8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu	80%
		Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan	80%
9	Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang berKTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman	90%
Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kab. Pacitan			
1	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	85%
2	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kab. Pacitan minimal B	100%
3	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP
Penyelenggara Dukungan Sarana dan Prasarana			
1	Meningkatnya sarana dukungan transportasi/mobilitas pegawai	persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	100%
2	Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana mebelair/elektronik di kantor KPU Kab. Pacitan	100%

3	Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Gedung/Bangunan Kantor KPU Kab. Pacitan	Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung kantor KPU Kab Pacitan/tersedianya gedung dan gudang yang memadai untuk KPU Kab. Pacitan	100%
Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu			
1	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase ketepatan waktu penyuluhan	87%
		Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU	87%
		Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	87%
2	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilu	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan LDK, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD	88%
		Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD	88%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	91%
		terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	91%
		terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	91%
Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu			
1	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase proses PAW anggota DPRD Kab Pacitan yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
		terlaksananya pembentukan PPID	100%
		Persentase penataan daerah pemilihan pasca pemilu 2014	75%
		Persentase Jumlah data serta dokumen Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	100%
		Jumlah kegiatan pendidikan pemilih	91%
		persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	100%

D. Perjanjian Kinerja Tahun

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, pada tanggal 07 Januari 2018 Sekretariat KPU telah menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2018. PK Tahun 2018 tersebut mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasional	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Pacitan dengan lembaga riset Kepemiluan	85%
2	Terwujudnya Data Pemilih Yang Terkini	Persentase KPU Kabupaten Pacitan dalam Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Pacitan Dalam Mendistribusikan Logistik secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%
4	Meningkatkan Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Kesesuaian Pegawai Terhadap Standart Kompetensi	90%
5	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Nilai Evaluasi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	72%
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik			
1	Tersusunnya Rancangan dan Keputusan KPU Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Yang Disusun Dan Diharmonisasikan Dengan Tepat Waktu Sesuai Dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Pacitan Yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Sesuai Dengan Jadwal	100%

Program		Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp.27.278.684.000
2.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp.3.497.242.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 menentukan indikator- indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian kinerja.

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Setjen KPU Tahun 2019, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2018 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen- elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan - satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sekretariat KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2018. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)

➤ Layanan Perkantoran Baseline (3355.994)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi Perkanotra	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	2271376000	2144184148	94%	Laporan

Pada output ini Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan PAGU DIPA sebesar Rp.2.271.376.000,- dan realisasi penyerapan sebesar Rp.2.144.184.148 atau 96% yang digunakan untuk pembayaran gaji PNS, Uang Kehormatan Komisioner dan Tunjangan Kinerja.

➤ **Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Sekjen KPU (3355.003).**

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja diatas yaitu:

➤ **Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan (3355.003)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berbasis aktual KPU Tingkat UAKPA	27484000	26933000	94%	12 Laporan

Pada output ini Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga telah tersusun Laporan Keuangan berbasis akrual untuk periode Triwulan dan Semesteran sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 108/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 Tata Cara Revisi

Anggaran Tahun Anggaran.2019. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun sebagai bahan rekonsiliasi ke KPPN untuk memenuhi kegiatan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ke KPPN.

Sebagai dasar untuk menerbitkan Berita Acara rekonsiliasi. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan tiap bulan, diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas instansi dalam hal pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I dan Laporan Tahunan yang disusun bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur dengan fasilitasi dan supervisi dari KPU Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Pengelolaan dokumen Sistem Akuntansi Instansi (SAI) diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas instansi dalam hal pelaksanaan pelaporan keuangan.

Pada output ini Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan PAGU DIPA sebesar Rp.27.484.000,- dan realisasi penyerapan sebesar Rp.26.933.000 atau 98%

➤ **Petunjuk Pengelolaan Keuangan (Baseline) (3355.05)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU	7908000	4773600	60%	Laporan

Pada output ini Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan PAGU DIPA sebesar Rp.7.908.000,- dan realisasi penyerapan sebesar Rp.4.773.600 atau 60% digunakan untuk penyelesaian masalah dan Data Hibah Pilkada 2020

➤ **Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran / LPPA	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/ LPPA yang tepat waktu dan valid	8424000	6550000	78%	Laporan

Output yang telah dicapai adalah Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) ke KPU dan KPU Provinsi. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun, yang laporannya dikirim ke KPU RI dan KPU Provinsi melalui aplikasi SAIBA.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dilakukan secara rutin tiap bulan sekali selama 1 (satu) tahun dengan menggunakan aplikasi SILABI, yang laporannya disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Pacitan (KPPN).

Menyampaikan ke KPU Provinsi Jawa Timur Laporan Pertanggungjawaban Bendahara secara rutin tiap bulan sekali selama 1(satu) tahun. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan semester I dan II juga menyusun laporan persediaan Tahun 2019 dan laporan Barang Milik Negara tahun 2019, yang sudah dilaksanakan rekonsiliasi dengan KPKNL. Pada output ini Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan PAGU DIPA sebesar Rp8.424.000,- dan realisasi penyerapan sebesar Rp.6.550.000 atau 78%

➤ **Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu (3355.009)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Presentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	77602000	74680000	96%	Laporan

Bentuk kegiatan yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Pacitan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 77.602.000,- dan direalisasikan sepanjang tahun 2019 sebesar Rp.

74.680.000,- yaitu Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak 2019 dan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Tahapan Pemilu.

➤ **Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu. (3356)**

➤ **Data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu (3356.008)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	presentase satker yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	6116000	5900000	96%	Laporan

Pelaksanaan kegiatan ini berupa Evaluasi Pengelolaan logistik.. Bentuk kegiatan yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Pacitan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.6.116.000,- dan direalisasikan sepanjang tahun 2019 sebesar Rp.5.900.000,- (96%)

➤ **Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi (3356.014)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Presentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	22599000	22597500	100%	Dokumen Pengelolaan Logistik

Bentuk Kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Pacitan adalah Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi dengan PAGU DIPA sebesar Rp. 22.599.000,- dan realisasi yang diserap Rp. 22.597.500 (100%)

➤ **Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu (3356.015)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Presentase satker dalam menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilu	43055000	43053000	100%	Dokumen

Dalam anggaran tahun 2019 dan guna menunjang penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 KPU Kabupaten Pacitan dalam pemenuhan sarana dan prasarana Keperluan Pemilu dengan PAGU DIPA Rp 43.055.000,- dan realisasi yang diserap sebesar Rp. 43.053.000,- (100%)

➤ **Ketersediaan Logistik (3356.016)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Tersedianya kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Presentase Jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	1484787000	1455190710	98%	Dokumen

Bentuk Kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Pacitan adalah ketersediaan logistic pemilu, 2019, Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu, Pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu 2019 dengan PAGU DIPA sebesar Rp. 1.443.217.000,- dan realisasi yang diserap Rp. 1.417.620.560 (980%)

➤ **Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)**

➤ **Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKAKL	129.517.000	118.320.200	91%	Laporan

Pada akun ini secretariat KPU melakukan 1). Penyusunan Rencana kerja Anggaran Belanja Paket meeting keluar kota dengan PAGU Rp6.280.000,- dan Realisasi sebanyak Rp.5.045.700,- atau diserap 80%, 2). Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 dengan PAGU Rp. 71.400.000,- dan realisasi sebanyak Rp.64.166.000,- atau diserap 90% 3). Pengelolaan Program dan Kegiatan serta anggaran TA 2019 dengan PAGU Rp.37.687.000,- dan realisasi sebanyak Rp. 37.158.500,- atau diserap sebanyak 99% 4). Persiapan Penyusunan Anggaran Pemilihan Serentak 2020 dengan PAGU Rp. 14.150.000,- dan diserap sebanyak Rp. 11.950.000,- atau diserap sebanyak 84%.

➤ **Layanan operasional dan pelayanan TI (Baseline) (3357.003)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terpenuhinya sarane pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Presentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-procurement	34.200.000	23.011.200	67%	Laporan

Pada akun ini secretariat KPU 1). melakukan belanja dalam layanan Teknologi Informasi berupa sewa jaringan internet dan pemeliharaan dan monitoring jaringan LAN dengan PAGU Rp.34.000.000,- dan realisasi sebanyak Rp. 23.811.200 atau diserap sebanyak 67%



➤ **Laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggarann yang berkualitas	Presentase Program Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	5602000	984000	18%	Laporan

Pada akunt ini Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan melakukan monitoring dan supervise pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum dengan Rencana Aksi pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran dengan PAGU Rp.5.602.000,- dan realisasi sebanyak Rp.984.000,- atau 18%

➤ **Analisis Capaian kinerja (3357.026)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terwujudnya sistemn adminitrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib dan efektif dan efisien	Presentase KPU yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	4784000	4579000	96%	Dokumen

Diperlukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran agar capaian kinerjanya dapat terukur. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan melalui beberapa instrument yaitu: Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Fisik dari Triwulan I s.d Triwulan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Penyusunan Laporan Capaian Output berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 dilaksanakan tiap bulan pada minggu I, Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ tahun 2019) baik untuk Sekretariat KPU dan Komisioner dan penyusunan Perjanjian Kinerja KPU serta Sekretaris KPU tahun 2018 dan menyampaikan Dokumen LKJ dan Dokumen SAKIP berupa perjanjian kinerja Tahun 2019, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019,Rencana Aksi Kinerja Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Tahun2019) ke KPU Provinsi Jawa Timur.

➤ **Penyusunan Anggaran pemilu (3357.032)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	presntase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	70296000	65645000	93%	Dokumen

Pada akunt ini KPU Kabupaten Pacitan melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Melakukan pencermatan

anggaran belanja operasional maupun non operasional baik rutin maupun tahapan. Melakukan revisi anggaran baik revisi administrasi maupun revisi pergeseran anggaran. Kegiatan ini didukung dengan anggaran yang ada di DIPA sebesar Rp. 702.960.000,- dengan peruntukan berupa honor pokja, belanja paket meeting dalam kota, belanja modal yang telah di belanjakan berupa 1 buah laptop, dan belanja perjalanan dinas luar kota untuk mengikuti rakor di provinsi Jawa Timur yang telah terserap sebesar Rp.65.645.000,- (93,00%).

➤ **Monitoring dan Evaluasi Pemilu (3357.033)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib efektif dan efisien	Presentase monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	6713900	5987500	89%	Dokumen

Pada akunt ini KPU Kabupaten Pacitan melakukan beberapa kali rapat kerja atau rapat koordinasi dengan PPK 12 Kecamatan Se kabupaten Pacitan, memenuhi undangan rakor dengan KPU Povinsi dan melakukan penyusunan laporan evaluasi tahapan penyelenggaraan tahapan pemilu 2019. Kegiatan ini di dukung anggaran sebesar Rp 67.139.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.642.500,- atau (91%).

➤ **Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu (3357.034)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Tersedianya dan informasi sarana dan prasarana teknologi	Presentasi KPU dalam memutakhirkan data Pemilih	401115000	395735850	99%	Dokumen

Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan melaksanakan pemutakhiran data pemilih tahun 2019 berbasis data dengan menggunakan aplikasi SIDALIH dengan melakukan Input data melalui aplikasi SIDALIH. Untuk mendapatkan updating data KPU Kabupaten Pacitan melakukan koordinasi berbagai pihak terkait secara rutin dan melakukan kegiatan sesuai tahapan yaitu:

07 January 2019	Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2019
15 JANUARI 2019	Rapat Koordinasi terkait Data Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan
16 JANUARI 2019	Rapat Koordinasi terkait Data Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan bersama dengan Disdukcapil
18 JANUARI 2019	Rapat Koordinasi terkait Data Warga Binaan Lapas
21 JANUARI 2019	Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019
22-23 JANUARI 2019	Rapat Koordinasi Penyusunan DPK dan DPTb Pemilihan Umum 2019 dengan KPU Provinsi
24 JANUARI 2019	Rapat Koordinasi Penyusunan DPK, DPTb dan Perbaikan DPT
28-30 JANUARI 2019	Bimbingan Teknis Sidalih dan Keamanan Sistem Informasi Pemilihan Umum bersama KPU Provinsi Jawa timur

31 JANUARI 2019	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih terkait data ganda dan invalid dalam Pemilu 2019
1 FEBRUARI 2019	Sosialisasi Mekanisme Pindah Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019
7-9 FEBRUARI 2019	Verifikasi Faktual Data Pemilih Disabilitas, Data Pemilih Baru dan Data Invalid
11 FEBRUARI 2019	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dalam rangka Pengunggahan Data Pindah Pemilih ke Sidalih
14 FEBRUARI 2019	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dalam rangka Unggah Data ke Sidalih
16-17 FEBRUARI 2019	Monitoring Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan di Tingkat PPK
17 FEBRUARI 2019	Rapat Koodinasi Persiapan Rekapitulasi Daftar DPTb
18 FEBRUARI 2019	Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan di Tingkat Provinsi
18 February 2019	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan DPTb Pada Pemilu Tahun 2019
21 FEBRUARI 2019	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019
25 FEBRUARI 2019	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 bersama PPK
01 April 2019	Rapat Koordinasi Pasca Putusan MK dengan Bawaslu
03 April 2019	Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi DPTH-3 tingkat Provinsi Jawa Timur
08 April 2019	Koordinasi dengan Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Pacitan
11 April 2019	Rapat Koordinasi persiapan Rekapitulasi DPTb Tahap III
11 April 2019	Rapat Koordinasi Rekapitulasi DPTb Tahap III
4 MARET 2019	Sosialisasi Mekanisme Pindah Memilih Tahap 2 pada Pemilihan Umum 2019
15 MARET 2019	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih
18-19 MARET 2019	Monitoring Rekapitulasi DPTb II Tingkat PPK
19 MARET 2019	Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi DPTb dengan PPK
19 MARET 2019	Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan DPTb Tahap II
30-31 MARET 2019	Rapat Koordinasi terkait dengan Penyelesaian Tindak Lanjut Dugaan Data Bermasalah dari BPN 02 di Provinsi
20 March 2019	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTb Tahap II (kedua) Pada Pemilu 2019
26 June 2019	Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2019
03 July 2019	Analisis Pengolahan Data dan Evaluasi Pemilu serta Pemilukada
08 July 2019	Proses Pembukaan Kotak dan Pengambilan Formulir Model A.DPK-KPU Pemilu Tahun 2019
10-11 JULI 2019	Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (KPU Prov)
16-18 JULI 2019	Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Pilkada Serentak 2020 (KPU Prov)
01 August 2019	Review Tahap Kedua Penyusunan Anggaran Pilkada 2020 Wilayah Ponorogo, Trenggalek, Pacitan dan Ngawi (KPU Prov)
22-25 AGUSTUS 2019	Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak tahun 2020 (KPU RI)
9-10 OKTOBER 2019	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (KPU Prov)
3-5 DESEMBER 2019	Rapat Pimpinan Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2020 (KPU Jatim)

➤ **Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Output Baru-Perubahan Kebijakan- Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (3357.040)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terwujudnya Koordinasi antar lembaga serta penelitian dan pengembangan terhadap organisasi dan kebutuhan Pemilu	Perentase fasilitasi kerjasama dengan pihak lain terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	315648000	315648000	100%	Dokumen

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan kegiatan rekrutmen Badan Ad-Hoc Pemilu 2019 tidak serta merta menyusun sendiri tahapan kegiatannya, tetapi selalu berkoordinasi dan dalam petunjuk maupun arahan dari KPU Provinsi Jawa Timur. Bentuk koordinasi yang dimaksud adalah dengan mengikuti setiap kegiatan ataupun menghadiri undangan dari KPU Provinsi Jawa Timur yaitu pada :

- a. Menghadiri undangan KPU Provinsi Jawa Timur
- b. Rapat Pleno KPU Kabupaten Pacitan
- c. Penyusunan Timeline Rekrutment PPS Pemilu 2019

Pada akunt ini anggaran yang tersedia di gunakan untuk fasilitasi PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) . Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 315.648.000,- dan terealisasi sebesar Rp.315.648.000,- (100%).

➤ **Panitia Pemungutan Suara (PPS) Output Baru-Perubahan Kebijakan- Fasilitasi Panitia Pemungutan suara(3357.041)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Terwujudnya Koordinasi antar lembaga serta penelitian dan pengembangan terhadap organisasi dan kebutuhan Pemilu	Perentase fasilitasi kerjasama dengan pihak lain terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	1882368000	1882368000	100%

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan kegiatan rekrutmen PPS Pemilu 2019 tidak serta merta menyusun sendiri tahapan kegiatannya, tetapi selalu berkoordinasi dan dalam petunjuk maupun arahan dari KPU Provinsi Jawa Timur. Bentuk koordinasi yang dimaksud adalah dengan mengikuti setiap kegiatan ataupun menghadiri undangan dari KPU Provinsi Jawa Timur yaitu pada :

1. Menghadiri undangan KPU Provinsi Jawa Timur
2. Rapat Pleno KPU Kabupaten Pacitan
3. Penyusunan Timeline Rekrutment PPS Pemilu 2019

Pada akunt ini anggaran yang tersedia di gunakan untuk fasilitasi PPS (Panitia Pemungutan Suara) . Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.882.368.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.882.368.000,- (100%).

➤ **Badan Penyelenggara Ad-Hoc Pemilu (Output Baru)- Perubahan Kebijakan (3557.046)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terwujudnya Koordinasi antar lembaga serta penelitian dan pengembangan terhadap organisasi dan kebutuhan Pemilu	Perentase fasilitasi kerjasama dengan pihak lain terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	19589945000	19589945000	100%	Dokumen

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan kegiatan rekrutmen PPK, PPS, KPPS Pemilu 2019 tidak serta merta menyusun sendiri tahapan kegiatannya, tetapi selalu berkoordinasi dan dalam petunjuk maupun arahan dari KPU Provinsi Jawa Timur. Bentuk koordinasi yang dimaksud adalah dengan mengikuti setiap kegiatan ataupun menghadiri undangan dari KPU Provinsi Jawa Timur yaitu pada :

1. Menghadiri undangan KPU Provinsi Jawa Timur
2. Rapat Pleno KPU Kabupaten Pacitan
3. Penyusunan Timeline Rekrutment PPS Pemilu 2019

Pada akunt ini anggaran yang tersedia di gunakan untuk fasilitasi PPK (Panitia Pemungutan Suara), PPS (Panitia Pemunguta Suara) KPPS (Kelompok Panitia Penyelenggara Pemilu) . Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 19.589.945.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.589.945.000,- (100%).

➤ **Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)**

➤ **Laporan Persediaan (Stock Opname) (3360.009)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terwujudnya Pengelolaan BMN dan persediaan (Stock Opname)	Presentase laporan persediaan asset berdasarkan stock opname yang tepat	124922000	78463000	63%	Dokumen

Kegiatan stock opname barang persediaan untuk mengetahui kebenaran catatan pembukuan dengan yang ada di gudang, Kegiatan ini dilakukan satu kali dalam satu tahun di akhir tahun Stock opname dilaksanakan bulan Desember 2019 Hasilnya sudah dilaporkan dalam rapat pleno dan telah dilakukan rekonsiliasi dengan KPKNL Madiun. Digunakan dalam pengelolaan barang milik negara (BMN) dan penghapusan barang milik negara (BMN) dengan PAGU DIPA sebesar Rp.124.992.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 78.463.000,0 (93%)

➤ **Pengamanan Tahapan Pemilu (3360.023)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Meningkatnya layanan dukungan pengamanan tahapan Pemilu	Presentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas, personil anggota keamanan yang berKTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman	19815000	18690000	94%	Layanan

Bentuk kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Pacitan dalam hal pengamanan tahapan Pemilu adalah 1) Koordinasi dengan dinas instansi terkait, 2) Koordinasi dengan Bawaslu, 3) Koordinasi dengan Peserta Pemilu, 4) Koordinasi dengan Stakeholder. Dengan PAGU DIPA sebesar Rp. 19.815.000,- dan realisasi penyerapan sebesar Rp. 18.690.000,- (94%)

➤ **Penyusunan BMN Logistik Pemilu (3360.024)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Presentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	10950000	10715900	98%	Layanan

Pada akun ini sekretariat KPU melakukan Penyusunan Bahan Milik Negara (BMN) Logistik Pemilu dengan PAGU DIPA Rp.10.950.000,- dan realisasi sebanyak Rp. 18.690.000 ,-atau diserap sebanyak 98%

➤ **Pengadaan Kendaraan Bermotor (3360.051)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Presentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana mebelair/elektronik kantor KPU	498830000	489000000	98%	Layanan

Pada akun ini sekretariat KPU melakukan Pengadaan peralatan mesin dan pengadaan fasilitas perkantoran dengan PAGU DIPA Rp.498.830.000,- dan realisasi sebanyak Rp. 489.000.000 ,-atau diserap sebanyak 98%

➤ **Layanan Perkantoran (3360.994)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Meningkatnya kualitas Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan kebutuhan layanan operasional perkantoran sehari hari	951579000	898437200	94%	Layanan

A. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dilakukan secara rutin setiap bulan meliputi langganan daya dan jasa, pembayaran honor satpam dan pramubhakti, pemeliharaan alat- alat kantor, gedung, dan kendaraan dinas. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor digunakan untuk pembayaran belanja pakaian dinas pegawai, satpam, dan pramubhakti, dan pembayaran honor operasional satuan kerja.

B. Penyedia jasa surat menyurat

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat di KPU Kabupaten Pacitan merupakan kegiatan antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat- surat sebagai dokumen komunikasi resmi yang berbentuk arsip dinamis dan statis, disamping itu juga untuk memenuhi kebutuhan belanja jasa listrik, telepon dan air guna mendukung kelancaran jalannya operasional kantor. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KPU Kabupaten Pacitan yang disediakan pihak pemberi jasa. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan, Telepon dan air gedung perkantoran.

C. Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan operasional / dinas

Kegiatan ini selain terdapat kegiatan tindakan pengamanan serta penertiban administrasi aset bergerak milik KPU Kabupaten Pacitan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah kendaraan operasional dinas untuk pelaksanaan service PC/AC/Printer/Laptop dapat berjalan sebagaimana mestinya dan asset bisa operasional dengan baik dan lancar serta pemeliharaan dan perawatan gedung dan halaman agar nyaman dan indah dipandang mata.

D. Honor operasional satuan kerja.

Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Pacitan untuk satu tahun anggaran berjalan yaitu TA. 2019, untuk pembayaran honor pengelola keuangan, Pejabat Pengadaan barang dan Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

E. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.

Untuk meberikan rasa keseragaman dalam satu intitusi Komisi Pemilihan Umum, dan menimbulkan jiwa korsa yang tinggi,dianggarkan utnuk pengadaan pakaian satpam/pramubakti/sopir/ danuntuk ASN, dalam Tahun anggaran 2019 telah diralisasikan untuk pemenuhan seragam Dinas terrsebut.

F. Penyediaan alat tulis Kantor.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis Kantor untuk operasional KPU Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

G. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan belanja di KPU Kabupaten Pacitan sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan penggandaan beberapa dokumen sesuai kebutuhan. Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor sebagai pendukung sarana peralatan administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Pacitan.

➤ **Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)**

➤ **Laporan Hasil Evaluasi Lakip (3361.004)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Tersusunnya Laporan Lakip	Nilai Akuntabilitas Kerja Minimal C	9195000	7026000	76%	Dokumen

Pada akun ini sekretariat KPU melakukan Pelaporan LAKIP dengan PAGU DIPA Rp.9.195.000,- dan realisasi sebanyak Rp. 7.026.000 ,-atau diserap sebanyak 78%

➤ **Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Baseline) (3361.005)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Tersusunnya laporan hasil reiew laporan	Peningkatan Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	37698000	33822100	90%	WTP

Pada akun ini sekretariat KPU melakukan Pelaporan LAKIP dengan PAGU DIPA Rp.12.368.000,- dan realisasi sebanyak Rp. 12.050.000 ,-atau diserap sebanyak 97%

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)

1. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)

➤ **Advokasi dan Sengketa Hukum (3363.010)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	OUTPUT
Meningkatnya kualitas pertimbangan opini hukum dan	Persentase ketetapan waktu penulhan	3500000	3300000	94%	Bimtek dan Sosialisasi

penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU				Laporan Perjadin dan Dok. PPHU
-----------------------------	------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------

Kegiatan 3363.010 pada Advokasi dan Sengketa Hukum yang didukung anggaran sebesar Rp3.500.000,- Adapun kegiatan pada akun 3363.010 digunakan untuk kegiatan belanja barang dan konsumsi kegiatan penyusunan produk hukum KPU Kabupaten Pacitan dalam bentuk pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan dan Produk hukum lainnya. Dalam kegiatan ini dari segi anggaran mampu terserap 94% atau senilai Rp3.300.000,- akan tetapi dari segi kegiatan mencapai target 100%.

➤ **Kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum (3363.018)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	3968000	3968000	100%	Laporan Kegiatan
	Terlaksananya pengelolaan dokumen hukum				UU, PKPU, SK KPU, BA
	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir				UU, PKPU, SK KPU, BA
	Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)				Digitalisasi Arsip

Kegiatan 3363.018 pada Penyuluhan rancangan Keputusan yang didukung anggaran sebesar Rp3.968.000,-. Pada kegiatan 3.363.018 digunakan untuk kegiatan belanja persediaan barang konsumsi dan belanja bahan dalam penyuluhan dan kegiatan sosialisasi Produk Hukum KPU kabupaten Pacitan dalam Pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Dalam kegiatan ini dari segi anggaran terserap 86%, sedangkan dari segi kegiatan mencapai target 100%.

➤ **Pelayanan dan Kapasitas penyelenggaraan Pemilu (3363.019)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilu	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan LPSDK LPPDK. Audit dana kampanye, dan penyelesaian sengketa pemilu	60679000	52811400	87%	BA , LPPSDK, LPPDK, Audit KAP, Dok PHPU

Kegiatan 3363.019 pada Dana Kampanye Pemilu yang didukung anggaran sebesar Rp60.679.000,- Pada kegiatan 3363.019 secara keseluruhan terserap Rp52.811.400,- atau setara 87% dengan dengan rincian:

- Kegiatan 3363.019 A digunakan untuk kegiatan persiapan penerimaan laporan dana kampanye untuk belanja bahan, belanja honor, belanja persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dari Rp38.730.000,- terserap Rp32.600.000,- atau setara dengan 84%, sedangkan dari sisi kegiatan mencapai 100 %.
- Kegiatan 3363.019 B digunakan untuk kegiatan penerimaan laporan dana kampanye untuk belanja bahan, dan belanja perjalanan dinas dari Rp15.244.000,- terserap Rp13.636.000,- atau setara dengan 89%, sedangkan dari sisi kegiatan mencapai 100%.
- Kegiatan 3363.019 C digunakan untuk kegiatan Evaluasi Laporan dan Audit Dana Kampanye dalam belanja bahan dan belanja persediaan barang konsumsi dari Rp6.706.000,- terserap Rp6.645.000,- atau setara dengan 99%, sedangkan dari sisi kegiatan mencapai 100%.

➤ **Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu (3363.020)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	OUTPUT
Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini	12175000	7010000	97,5%	BA , LPPSDK, LPPDK, Audit KAP, Dok PHPU

Pada kegiatan 3363.020 A untuk kegiatan advokasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 dalam belanja bahan dan belanja persediaan barang konsumsi dari Rp.12.175.000,- terserap Rp.7.010.000,- atau setara dengan 97,5% sedangkan dari sisi kegiatan mencapai 100% . Pada kegiatan 3363.020 B digunakan untuk kegiatan penyelesaian sengketa hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 dalam belanja bahan dan belanja persediaan barang konsumsi dari Rp.92.577.000

terserap Rp.84.877.150 atau setara dengan 91,5% sedangkan dari sisi kegiatan mencapai 100% .

➤ **Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada**

1. Rancangan Pedoman/Juknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada (3364.001).

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian Kinerja	Output
Rancangan pedoman /Juknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada	Fasilitasi penyelesaian permasalahan pencalonan Pemilu	3	3	100 %	Kegiata

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	Output
Rancangan pedoman /Juknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada	Fasilitasi penyelesaian permasalahan pencalonan Pemilu	4.990.000	3.210.000	80 %	Kegiatan

Kegiatan dalam rangka meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan target fasilitasi penyelesaian permasalahan pencalonan dan kegiatan pencalonan Pemilu dengan melaksanakan Rapat koordinasi dengan lembaga / stakeholder terkait dan peserta Pemilu tahun 2019 dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali kegiatan dalam program paket meeting dalam kota.

Ditunjang juga dengan belanja bahan dan belanja jasa lainnya untuk diumumkan pada media massa meliputi pengumuman pendaftaran dan output dari kegiatan pencalonan, dengan serapan anggaran sebesar 80%.

2. Sosialisasi Kebijakan KPU kepada stakeholder

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian Kinerja	Output
Sosialisasi Kebijakan KPU kepada stakeholder	Sosialisasi Penyelenggaraan pemilu	1	1	100 %	Kegiatan

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	Output
Sosialisasi Kebijakan KPU kepada stakeholder	Sosialisasi Penyelenggaraan pemilu	15.400.000	14.575.000	94.64 %	Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 ditujukan kepada stakeholder, partai politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat. KPU Kabupaten Pacitan telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan serapan anggaran 94,64%

3. Pengelolaan PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (3364.004).

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Output
Koordinasi PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	Pengelolaan PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1	-	-	Laporan

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	Output
Rancangan pedoman /Juknis penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Fasilitasi penyelesaian permasalahan pencalonan Pemilu	15.000.000	0	0 %	Kegiatan

Kegiatan dalam rangka meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, dengan indikator pengelolaan PAW anggota DPRD Kabupaten nihil karena tidak adanya surat perintah PAW dari DPRD Kabupaten Pacitan, sehingga tidak ada serapan anggaran.

4. Publikasi Informasi (3364.005)

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Output
Publikasi Informasi	Penerbitan bahan informasi kepemiluan dan Pilkada	1	1	1	Laporan

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	Output
Publikasi Informasi	Penerbitan bahan informasi pemilihan dan Pilkada	8.660.000	7.460.000	88,19 %	Kegiatan

Kegiatan Publikasi Informasi ini bertujuan sebagai bahan untuk menerbitkan bahan informasi pemilihan dan Pilkada dan pelayanan pers, dengan serapan anggaran 88,19%

5. Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas (3364.006)

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Output
Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Pendidikan pemilih melalui metode tatap muka pemula, perempuan dan disabilitas	1	1	1	Laporan

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	Output
Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Pendidikan pemilih melalui metode tatap muka pemula, perempuan dan disabilitas	75.000.000	55.602.000	88,82 %	Kegiatan

Kegiatan pendidikan Pemilih yang diorientasikan kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan metode tatap muka, dimana bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemilih tentang Pemilu dan Demokrasi. Dengan realisasi anggaran sebesar 88.82%.

6. Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.030).

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Output
Analisa hasil pengolahan data dan evaluasi system pemilu dan pilkada.	Pengelolaan Dokumen Pemilu 2018.	1	1	100%	Laporan dan dokumen

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Output
Analisa hasil pengolahan data dan evaluasi system pemilu dan pilkada.	Pengelolaan Dokumen Pemilu 2018.	40.000.000	40.000.000	98,28%	Laporan dan dokumen

Kegiatan dalam rangka meningkatnya kualitas dukungan teknis dan evaluasi system pemilu dan pilkada dengan indikator pengelolaan dokumen Pemilu 2018 dengan kegiatan belanja bahan dan paket meeting dalam kota sebanyak 4 (empat) kali kegiatan.

7. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (3364.032)

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Output
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	1	1	100%	Laporan dan dokumen

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Output
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	50.000.000	37.248.000	77,78%	Laporan dan dokumen

Kegiatan ini mencakup pengembangan rumah pintar pemilu, fasilitasi audiensi rumah pintar pemilu dan penyusunan laporan kegiatan pendidikan pemilih rumah pintar pemilu yang tersedia anggaran sebesar Rp. 50.000.000 yang di alokasikan untuk perlengkapan materi rumah pintar pemilu yaitu sebesar 77.78%.

8. Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih Pemilu (3364.043).

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Output
Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terseleksi Pemilu	Terseleksinya Calon Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Periode 2019 - 2024	1	1	100%	Laporan dan Dokumen

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Output
Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terseleksi Pemilu	Terseleksinya Calon Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Periode 2019 - 2024	25.001.000	25.000.000	100%	Laporan dan Dokumen

Kegiatan dalam rangka meningkatnya kualitas dukungan teknis dan evaluasi sistem pemilu indikator terseleksinya Calon Anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode 2019 - 2024 dengan kegiatan paket meeting dalam kota sebanyak 1 (satu) kali kegiatan dan terlaksana dengan lancar dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp.25.001.000,- dan serapan anggaran 100%.

9. Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.047)

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Output
Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Fasilitasi Kampanye Peserta Pemilu	1	1	100%	Laporan dan Dokumen

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Output
Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Fasilitasi Kampanye Peserta Pemilu	114.366.000	108.942.000	95.97%	Laporan dan Dokumen

Kampanye Pemilu calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden dianggarkan untuk fasilitasi kampanye peserta pemilu dan rapat koordinasi kampanye pemilu serentak tahun 2019, dengan anggaran Rp. 114.366.000 dan serapan anggaran sejumlah 95.97%.

10. Supervisi / Monitoring / Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu (3364.049).

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian Kinerja	Output
Supervisi/monitoring/bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu	Supervisi tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilpres 2019	1	1	100%	Laporan

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	Output
Supervisi/monitoring/bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu	Supervisi tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilpres 2019	59.000.000	54.842.000	92.95%	Laporan

Kegiatan dalam rangka meningkatnya kualitas dukungan teknis dan evaluasi sistem pemilu dan penyelenggaraan pemilu dengan melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring serta bimbingan teknis kepada PPK dan PPS di tiap-tiap kecamatan se kabupaten Pacitan yang teragenda dan terjadwal. Serapan anggaran untuk kegiatan ini sebesar 92.95% dari pagu sebesar 59.000.000.

11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu (3364.050)

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian Kinerja	Output
Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1	1	100%	Laporan

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	Output
Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	123.498.000	92.709.000	78.22%	Laporan

Sosialisasi yang diselenggarakan KPU Pacitan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam dengan harapan muncul pemahaman terkait kepemiluan sehingga memiliki kemampuan dalam mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat sekitar. Tahapan yang akan diselenggarakan dengan metode sosialisasi ini adalah pindah memilih, surat suara pemilihan legislative serta Presiden dan Wakil Presiden, tata cara mencoblos, tahapan kampanye, hari pemungutan suara, fasilitasi terima kasih karena telah memilih, monitoring, supervise dan evaluasi sosialisasi pemilu 2019. Anggaran yang tersedia untuk giat sosialisasi ini adalah sebesar Rp. 123.498.000 dengan serapan anggaran sebesar 78.22%.

12. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum (3364.052)

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian Kinerja	Output
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	1	1	100%	Laporan

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	Output
Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	448.500.000	431.981.000	97,13%	Laporan

Kegiatan Pendidikan Pemilih di fokuskan untuk konsolidasi partisipasi masyarakat, fasilitasi pendidikan pemilih, pendaftaran lembaga survey dan penghitungan cepat, lomba selvie TPS, lomba kreasi pentas seni pemilih pemula, pengadaan alat peraga pendidikan pemilih pemilu 2019,

pendidikan pemilih mobilisasi masa, dan KPU Run “ satu tujuan melangkah bersama” pemilu serentak damai 2019, dengan anggaran 448.500.000 dan serapan anggaran 97,13%.

13. Relawan Demokrasi (3364.053)

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian Kinerja	Output
Relawan Demokrasi	Relawan Demokrasi	1	1	100%	Laporan

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	Output
Relawan Demokrasi	Relawan Demokrasi	414.500.000	385.885.000	91,28%	Laporan

Relawan demokrasi mencangkup pemenuhan kegiatan pembentukan relawan demokrasi, fasilitasi kegiatan relawan demokrasi, bimtek relawan demokrasi, dan penyusunan laporan kegiatan relawan demokrasi dengan anggaran 414.500.000 dan serapan anggaran 91,28%.

14. Pemungutan Suara (3364.054).

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Output
Pemungutan suara	Terlaksananya kegiatan Pemungutan suara di TPS. - Bimtek pemungutan suara	3	3	100%	Laporan

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Output
Pemungutan suara	Terlaksananya kegiatan Pemungutan suara di TPS. - Bimtek pemungutan suara	65.875.000	61.668.000	85,91%	Laporan

kegiatan dalam rangka meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam penyelenggaraan pemilu dengan terlaksananya kegiatan pemungutan suara di TPS dengan paket meeting dalam kota yang dilaksanakan 3 (tiga) kali dan bimbingan teknis pemungutan suara ditunjang dengan belanja jasa dan perjalanan dinas.

15. Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (3364.055).

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Output
Rekapitulasi dan penghitungan suara	<ul style="list-style-type: none"> - Bimtek penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu dan pilpres 2019. - Bimtek aplikasi sistem penghitungan suara. - Ujicoba nasional penggunaan aplikasi situng. - Pusat pemantauan pemungutan dan penghitungan suara Terselenggaranya Rekapitulasi dan penghitungan suara berjenjang.	1	1	100%	Laporan

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Output
Rekapitulasi dan penghitungan suara	<ul style="list-style-type: none"> - Bimtek penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu dan pilpres 2019. - Bimtek aplikasi sistem penghitungan suara. - Ujicoba nasional penggunaan aplikasi situng. - Pusat pemantauan pemungutan dan penghitungan suara Terselenggaranya Rekapitulasi dan penghitungan suara berjenjang.	16.501.000	16.500.000	99,99%	Laporan

Kegiatan dalam rangka meningkatnya kualitas dukungan teknis dan terselenggaranya kegiatan rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat kabupaten. Secara umum aturan terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar diawali dengan kegiatan Bimtek dan supervisi berjenjang kepada PPK dan PPS juga penerapan Uji coba Nasional penggunaan aplikasi Situng selama 3 (tiga) kali.

16. Penetapan Hasil Pemilu (3364.056).

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Output
Penetapan hasil Pemilu 2019	Penetapan hasil suara pemilu 2019 dan Penetapan perolehan kursi anggota Legislatif	1	1	100%	Laporan

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Output
Penetapan hasil Pemilu 2019	Penetapan hasil suara pemilu 2019 dan Penetapan perolehan kursi anggota Legislatif	60.000.000	60.000.000	100%	Laporan

Kegiatan dalam rangka meningkatnya kualitas dukungan teknis dan evaluasi system pemilu dengan indikator kinerja Penetapan hasil suara Pemilu dan penetapan perolehan kursi hasil pemilu 2019 dengan mengundang muspida, peserta pemilu, stakeholder dan tokoh masyarakat dalam 1 (satu) kali kegiatan belanja bahan dan paket meeting dengan ditunjang anggaran sebesar Rp.60.000.000,00.

C. REALISASI ANGGARAN

Setelah revisi DIPA ke 6, pagu KPU Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2019 sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Anggaran Petikan DIPA Petikan KPU Kabupaten Pacitan Nomor : SP DIPA-076.01.2.657825/2019 Revisi 05 Tanggal 17Desember 2019

Realisasi Pagu Anggaran PerProgram KPU Kabupaten Pacitan sebagai berikut

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		PAGU DIPA	REALISASI	PERSEN	OUTPUT
Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	Rp2.271.376.000	Rp2.144.184.148	94%	Laporan

Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berbasis aktual KPU Tingkat UAKPA	Rp27.484.000	Rp26.933.000	94%	12 Laporan
Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU	Rp7.908.000	Rp4.773.600	60%	Laporan
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran / LPPA	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/ LPPA yang tepat waktu dan valid	Rp8.424.000	Rp6.550.000	78%	Laporan
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Presentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	Rp77.602.000	Rp74.680.000	96%	Laporan
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	presentase satker yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	Rp6.116.000	Rp5.900.000	96%	Laporan
Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Presentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	Rp22.599.000	Rp22.597.500	100%	Dokumen Pengelolaan Logistik
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Presentase satker dalam menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilu	Rp43.055.000	Rp43.053.000	100%	Dokumen

Tersedianya kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Presentase Jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	Rp1.484.787.000	Rp1.455.190.710	98%	Dokumen
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan data		PAGU DIPA	REALISASI	PERSEN	OUTPUT
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKAKL	Rp129.517.000	Rp118.320.200	91%	Renstra, RKAKL
Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Presentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-procurement	Rp34.200.000	Rp23.011.200	67%	Laporan
Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang berkualitas	Presentase Program Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	Rp5.602.000	Rp984.000	18%	Laporan
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib dan efektif dan efisien	Presentase KPU yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Rp4.784.000	Rp4.579.000	96%	Laporan
Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	presentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	Rp70.296.000	Rp65.645.000	93%	Dokumen
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib efektif dan efisien	Presentase monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Rp67.139.000	Rp59.857.500	89%	Dokumen
Tersedianya dan informasi sarana dan prasarana teknologi	Presentasi KPU dalam memutakhirkan data Pemilih	Rp401.115.000	Rp395.735.850	99%	Dokumen
Terwujudnya Koordinasi antar lembaga serta penelitian dan pengembangan terhadap organisasi dan kebutuhan Pemilu	Presentase fasilitasi kerjasama dengan pihak lain terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	Rp315.648.000	Rp315.648.000	100%	Dokumen
Terwujudnya Koordinasi antar lembaga serta penelitian dan pengembangan terhadap	Presentase fasilitasi kerjasama dengan pihak	Rp1.882.368.000	Rp1.882.368.000	100%	Dokumen

organisasi dan kebutuhan Pemilu	lain terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi				
Terwujudnya Koordinasi antar lembaga serta penelitian dan pengembangan terhadap organisasi dan kebutuhan Pemilu	Perentase fasilitasi kerjasama dengan pihak lain terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	Rp19.589.945.000	Rp19.585.240.000	100%	Dokumen
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantora		PAGU DIPA	REALISASI	PERSEN	OUTPUT
Terwujudnya Pengelolaan BMN dan persediaan (Stock Opname)	Presentase laporan persediaan asset berdasarkan stock opname yang tepat	Rp124.922.000	Rp78.463.000	63%	Dokumen
Meningkatnya layanan dukungan pengamanan tahapan Pemilu	Presentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas, personil anggota keamanan yang berKTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman	Rp19.815.000	Rp18.690.000	94%	Layanan
Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Presentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	Rp10.950.000	Rp10.715.900	98%	Layanan
Meningkatnya kualitas Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan kebutuhan layanan operasional perkantoran sehari hari	Rp951.579.000	Rp898.437.200	94%	Layanan
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		PAGU DIPA	REALISASI	PERSEN	OUTPUT
Tersusunya Laporan Lakip	Nilai Akuntabilitas Kerja Minimal C	Rp9.195.000	Rp7.026.000	76%	Dokumen
Tersusunnya laporan hasil reiew laporan	Peningkatan Kualitas penyusunan laporan	Rp37.698.000	Rp33.822.100	90%	WTP

	keuangan sesuai SAP				
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik		PAGU DIPA	REALISASI	PERSEN	OUTPUT
Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilu	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan LPSDK LPPDK. Audit dana kampanye, dan penyelesaian sengketa pemilu	Rp 60.679.000	Rp 52.881.400	87%	BA , LPPSDK, LPPDK, Audit KAP, Dok PHPU
Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan /opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	Rp 3.968.000	Rp 3.968.000	100%	Laporan Kegiatan
	Terlaksananya pengelolaan dokumen hukum				UU, PKPU, SK KPU, BA
	Terlaksananya penyediaan dan penyajian				UU, PKPU, SK KPU, BA
Meningkatnya kualitas pertimbangan opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase ketetapan waktu penulhan	Rp 3.500.000	Rp 3.300.000	94%	Bimtek dan Sosialisasi, Laporan Perjadin, Dok PHPU
	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU				
Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan /opini	Rp12.175.000	Rp7.010.000	58%	BA , LPPSDK, LPPDK, Audit KAP, Dok PHPU
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada		PAGU DIPA	REALISASI	PERSEN	OUTPUT
Rancangan pedoman /Juknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada	Fasilitasi penyelesaian permasalahan pencalonan Pemilu	4.990.000	3.210.000	80%	Kegiatan

Sosialisasi Kebijakan KPU kepada stakeholder	Sosialisasi Penyelenggaraan pemilu	15.400.000	14.575.000	94,64 %	Kegiatan
Rancangan pedoman /Juknis penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Fasilitasi penyelesaian permasalahan pencalonan Pemilu	15.000.000	0	0%	Kegiatan
Publikasi Informasi	Penerbitan bahan informasi kepiluan dan Pilkada	8.660.000	7.460.000	88,19%	Kegiatan
Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Pendidikan pemilih melalui metode tatap muka pemula, perempuan dan disabilitas	75.000.000	55.602.000	88,82%	Kegiatan
Analisa hasil pengolahan data dan evaluasi system pemilu dan pilkada.	Pengelolaan Dokumen Pemilu 2018.	40.000.000	40.000.000	98,28%	Laporan dan dokumen
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	50.000.000	37.248.000	77,78%	Laporan dan dokumen
Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terseleksi Pemilu	Terseleksinya Calon Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Periode 2019 - 2024	25.001.000	25.000.000	100%	Laporan dan Dokumen
Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Fasilitasi Kampanye Peserta Pemilu	114.366.000	108.942.000	95,97%	Laporan dan Dokumen
Supervisi/monitoring/ bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu	Supervisi tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilpres 2019	59.000.000	54.842.000	92,95%	Laporan
Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	123.498.000	92.709.000	78,22%	Laporan
Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu		448.500.000	431.981.000	97,13%	Laporan

	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu				
Relawan Demokrasi	Relawan Demokrasi	414.500.000	385.885.000	91,28%	Laporan
Pemungutan suara	Terlaksananya kegiatan Pemungutan suara di TPS.	65.875.000	61.668.000	85,91%	Laporan
	- Bimtek pemungutan suara				
Rekapitulasi dan penghitungan suara	- Bimtek penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu dan pilpres 2019.	16.501.000	16.500.000	99,99%	Laporan
	- Bimtek aplikasi sistem penghitungan suara.				
	- Ujicoba nasional penggunaan aplikasi situng.				
	- Pusat pemantauan pemungutan dan penghitungan suara				
	Terselenggaranya Rekapitulasi dan penghitungan suara berjenjang.				
Penetapan hasil Pemilu 2019	Penetapan hasil suara pemilu 2019 dan Penetapan perolehan	60.000.000	60.000.000	100%	Laporan

	kursi anggota Legislatif			
--	-----------------------------	--	--	--

BAB IV

PENUTUP

Secara umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2019 dengan baik. Dari 3 (tiga) program yang dijabarkan menjadi 8 (delapan) kegiatan, 45 (Empat Puluh Lima) output, sesuai yang tercantum dalam Setelah revisi DIPA ke 6, pagu KPU Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2019 sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Anggaran Petikan DIPA Petikan KPU Kabupaten Pacitan Nomor : SP DIPA-076.01.2.657825/2019 Revisi 05 Tanggal 17Desember 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat beberapa kali revisi DIPA, revisi DIPA terakhir dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.220.737.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 28.745.186.308 dan sisanya sebesar Rp. 475.550.692,- , sehingga realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar 98 %.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkat kerja keras semua pihak baik secara internal maupun eksternal. Meskipun demikian masih terdapat hal-hal yang belum tercapai secara maksimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pada tahun-tahun yang akan datang agar lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan produktifitasnya. Namun kami menyadari bahwa Laporan capaian Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.